

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Penelitian Terdahulu

Saya selaku penulis memiliki ketertarikan untuk meneliti fenomena islamophobia di Prancis karena Prancis adalah negara penggagas demokrasi, terutama demokrasi dalam bebas memeluk atau memilih kepercayaan beragama. Akan tetapi muncul fenomena islamophobia dinegara Prancis tersebut. Sebelum melakukan penelitian, penulis mencantumkan beberapa studi pustaka untuk mencari informasi yang berkaitan dengan peran OKI sebagai organisasi internasional yang bertujuan mencapai perdamaian dunia, dalam upaya menganalisis rumusan masalah yang tercantum pada skripsi ini. Dengan adanya studi pustaka, diharapkan beberapa rujukan tersebut akan memberikan kontribusi baru sebagai referensi bagi penulis.

Pertama, skripsi yang berjudul “Upaya Organisasi Kerjasama Islam (OKI) Mengurangi Fenomena Islamophobia di Belanda Pasca Peristiwa 9/11” yang ditulis oleh Septian Tri Cahyo pada tahun 2016, Septian menyimpulkan bahwa perkembangan Islam di Eropa berasal dari pekerja imigran.<sup>9</sup> Populasi Islam di Eropa mulai berkembang pada tahun 1950 di saat kebanyakan imigran berasal dari berbagai negara mediteran seperti

---

<sup>9</sup> Septian Tri Cahyo. *Upaya Organisasi Kerjasama Islam (OKI) Mengurangi Fenomena Islamophobia di Belanda Pasca Peristiwa 9/11*. 2015. FISIP UMY. <http://repository.umy.ac.id> diakses pada 14 Mei 2022

Turki, Maroko, Algeria, dan Tunisia.

Peningkatan angka imigran muslim di negara-negara Barat khususnya di Eropa, awalnya disambut baik oleh pemerintah negara-negara Eropa karena mereka termasuk sumber tenaga kerja yang murah. Namun secara perlahan para imigran mulai memunculkan jati diri mereka dan identitas keislamannya, di antaranya ialah dengan membangun masjid serta pusat-pusat keislaman, dan secara aktif menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat luas di Eropa. Maka pada saat itulah pemerintah mulai merasa terancam bahaya. Ditambah lagi dengan dakwah serta pengenalan Islam di Eropa semakin luas sehingga semakin banyak masyarakat Eropa yang memeluk agama Islam yang selanjutnya menimbulkan kekhawatiran pemerintah Eropa. Apalagi dengan merebaknya peristiwa 11 September 2001 yang menembakkan kesalahannya pada umat Islam. Septian Tri Cahyo menganggap peristiwa tersebut sebagai titik tolak perubahan pola interaksi dalam hubungan internasional, dengan upaya negara-negara untuk menegakkan “perang melawan terorisme” yang pada akhirnya memunculkan islamophobia.

Antara karya Septian Tri Cahyo dengan skripsi ini memiliki kesamaan pola dan variabel walaupun dengan objek yang berbeda. Secara umum peran OKI dalam menghadapi fenomena islamophobia di Belanda memiliki keberadaan yang sama dengan yang terjadi di Perancis. Namun perbedaan terletak pada objek cakupan penelitian dimana penulis akan menekankan

pada islamophobia yang terjadi setelah aksi teror pada November 2015 di Perancis yang kondisi geografi serta demografinya tentu berbeda dengan Belanda. Adapun titik kesamaannya terletak pada upaya OKI dalam meredam tindakan islamophobia di negara manapun demi tercapainya perdamaian internasional.

Kedua, penulis juga mengambil telaah pustaka lain sebagai pembanding antarvariabel, pola, maupun objek penelitian, yaitu sebuah thesis dari Monalisa Saflembolo yang berjudul “Upaya Organisasi Konferensi Islam (OKI) dalam mengatasi konflik etnis antara muslim Rohingya dan Budha Rakhine di Myanmar (2011-2014),” yang diterbitkan pada tahun 2015.<sup>10</sup> Dalam thesis tersebut, Monalisa menuliskan bahwa konflik suku Rohingya dan Rakhine muncul sejak pertengahan abad ke-20.

Status kewarganegaraan Rohingya tidak dipertegas dengan hukum imigran yang jelas. Terjadi penolakan dan pertentangan kewarganegaraan terhadap suku Rohingya. Rohingya mengalami diskriminasi dan tidak mendapat tempat yang layak di Myanmar karena secara eksplisit Rohingya merupakan kaum pendatang yang tidak memiliki kedaulatan sendiri. Monalisa juga menuliskan bahwa Myanmar menutup akses bagi keabsahan hukum legal imigran bagi warga Rohingya di bawah pemerintahan Junta militer.

---

<sup>10</sup> Monalisa Saflembolo. *Upaya Organisasi Konferensi Islam (OKI) dalam mengatasi konflik etnis antara muslim Rohingya dan Budha Rakhine di Myanmar (2011-2014)*. 2015. Yogyakarta: UPN Veteran. <http://eprints.upnyk.ac.id> diakses pada 15 Mei 2022

Konflik etnis yang terjadi antara muslim Rohingya dan Budha Rakhine bahkan sudah terjadi sebelum kemerdekaan Myanmar dan sampai saat ini belum mencapai penyelesaian. Hak muslim Rohingya yang terabaikan dan tidak mendapat apresiasi dari pemerintah Myanmar menyebabkan OKI mengambil posisi dalam peran sebagai mediator dari konflik tersebut yang bertujuan untuk melindungi aspirasi umat yang ada di dunia.

Ketiga, penulis menggunakan referensi dari Yuana Khamsiani (2018), berjudul “Peran Organisasi Kerjasama Islam Dalam Upaya Mengatasi Tindakan Islamophobia Di Perancis Pasca Tragedi Serangan Paris 13 November 2015 (Periode 2015-2017)”.<sup>11</sup> Skripsi ini yang membahas mengenai peran Organisasi Kerjasama Islam (OKI) pada upaya mengatasi tindakan islamophobia di Perancis pasca tragedi serangan Paris 13 November 2015. Skripsi ini menyajikan pembahasan mulai dari kedatangan Islam di Perancis, perkembangan Islam serta kemunculan islamophobia. lalu skripsi ini menjabarkan profil OKI dan perannya menjadi ‘suara muslim’ di seluruh penjuru dunia, untuk mengatasi berbagai problema pada warga muslim, terutama fenomena islamophobia yang semakin merajalela.

Pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai upaya untuk menekankan pada pemahaman secara mendalam terhadap suatu perseteruan. Dengan tipe penelitian yang

---

<sup>11</sup> Yuana Khamsiani (2018), berjudul “Peran Organisasi Kerjasama Islam Dalam Upaya Mengatasi Tindakan Islamophobia Di Perancis Pasca Tragedi Serangan Paris 13 November 2015 (Periode 2015-2017). Skripsi, Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

digunakan penulis ialah deskriptif-analisis guna memaparkan temuan baru terkait menggunakan topik yang diangkat. Penelitian ini memakai teknik pengumpulan data berupa studi/kajian pustaka atau *Library Research* yang dilakukan dengan cara mencari warta secara tertulis. penelitian ini juga memakai jenis data teoritis dengan cara memanfaatkan data-data sekunder dari buku, jurnal, artikel, media cetak, media elektronika, dan website yang sudah diolah menjadi data. Adapun tentang kerangka pemikiran, ada 2 teori yang digunakan penulis pada skripsi ini, yaitu HAM serta organisasi internasional. ke 2 teori tersebut diharapkan penulis menjadi alur logika yang sejalan dengan peran OKI dalam mengatasi islamophobia di Perancis.

Dalam tinjauan pustaka di atas, terlihat jelas adanya kesamaan pola dengan menggunakan objek serta variabel yang berbeda. Misi utama OKI mengambil peran baik dalam konflik etnis maupun fenomena Islamophobia adalah sama, yaitu melindungi aspirasi muslim di penjuru dunia serta menegakkan HAM bagi seluruh umat. Perbedaan terlihat dari bagaimana Monalisa menekankan pada konflik antaretnis di suatu negara, sedangkan penulis fokus pada sikap “menolak Islam” sebagai akibat dari maraknya terorisme.

Sebagai telaah pustaka yang terakhir, penulis mengulas sebuah jurnal karya Hanan Rananta Arbi yang berjudul “Reaksi Uni Eropa terhadap Islamophobia di Perancis pada tahun 2011-2015.”<sup>12</sup> Dalam karyanya,

---

<sup>12</sup> Hanan Rananta Arbi. *Reaksi Uni Eropa terhadap Islamophobia di Perancis pada tahun*

Hanan Rananta menulis bahwa islamophobia adalah perasaan ketakutan atau kebencian terhadap Islam, orang-orang yang memeluk ajaran Islam, maupun budaya Islam. Di Eropa sendiri, islamophobia bukanlah fenomena baru. Sekitar sejak abad ke-8 masehi gejala kebencian terhadap Islam telah muncul di Eropa, dan hingga saat ini telah berkembang dalam berbagai bentuk. Namun fenomena tersebut kian menjadi lebih kompleks sejak tragedi 9/11 yang terjadi di AS, bom bunuh diri di London Inggris pada tahun 2005, bom bunuh diri di Spanyol, dan lain sebagainya. Akibat tragedi-tragedi tersebut, masyarakat Eropa mulai terprovokasi untuk memandang Islam dengan penuh ketakutan dan kecurigaan.

Bagi Hanan Rananta Arbi, merujuk pada berbagai tindak sentimental terhadap agama Islam di Perancis yang memang lebih terlihat memburuk daripada negara-negara Eropa lainnya, Uni Eropa sebagai organisasi kawasan induk di Eropa sudah seharusnya memiliki porsi dan perannya dalam merespon munculnya fenomena anti-Islam tersebut. Maka sebagai sebuah organisasi kawasan yang telah berhasil mengintegrasikan banyak negara dengan latar belakang sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan yang berbeda-beda, Uni Eropa harus mampu membuat formulasi kebijakan yang dapat diterima oleh seluruh negara anggotanya demi kepentingan bersama.

Jika dua pustaka sebelumnya memiliki fokus utama yang sama dengan yang dipakai oleh penulis, yaitu meneliti tentang upaya atau peran OKI,

---

2011-2015. <http://hi.fisip.uns.ac.id> diakses pada 15 Mei 2022

namun pustaka terakhir ini justru fokus pada reaksi Uni Eropa sebagai organisasi kawasan. Walaupun keduanya menggunakan Perancis sebagai objek penelitian, namun hipotesa yang akan dicapai pastilah berbeda karena dasar kebijakan serta visi maupun misi dari Uni Eropa dan OKI sangat berbeda. OKI yang berbasis Islam, dianggap penulis akan lebih berperan signifikan terhadap pencapaian hak-hak dan ruang gerak bagi muslim di seluruh penjuru Eropa, khususnya di Perancis. Berbeda dengan reaksi Uni Eropa sebagaimana yang ditulis oleh Hanan Rananta Arbi, dalam skripsi ini akan ditemukan bagaimana peran OKI yang sejatinya memihak pada warga muslim yang menjadi korban atas maraknya fenomena tindakan islamophobia pada masa kini.

## **2.2 Kajian Kepustakaan**

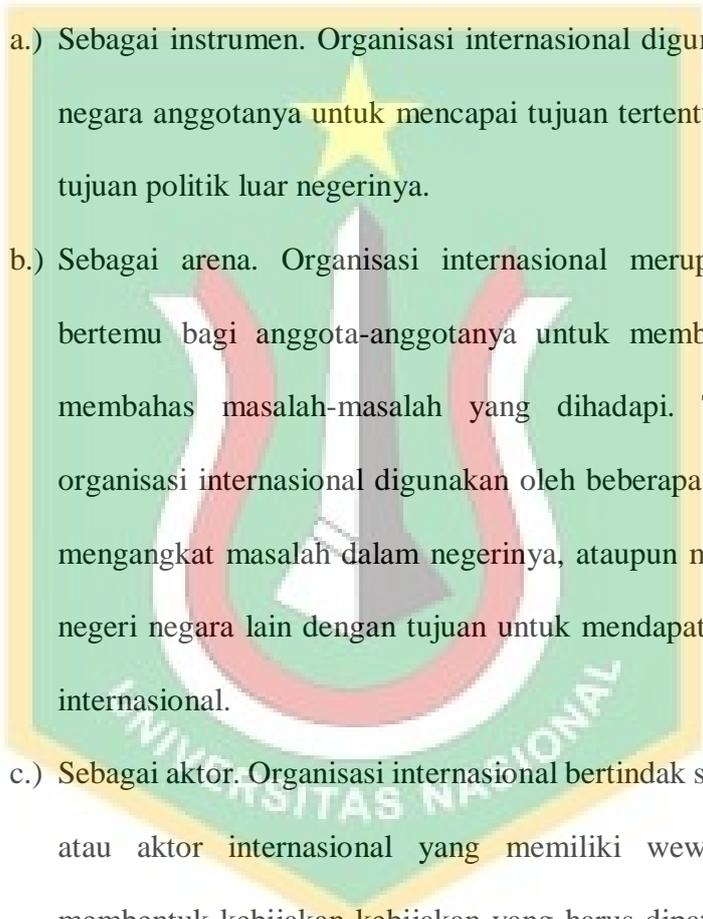
### **2.2.1 Teori Organisasi Internasional**

Definisi organisasi internasional adalah suatu pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari pada struktur organisasi yang jelas, yang diharapkan dapat berfungsi secara berkesinambungan dan melembaga dalam usaha untuk mencapai tujuan-tujuan yang diperlukan serta yang disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antar sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda.

Pendapat lain menyebutkan bahwa organisasi internasional didefinisikan sebagai suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu

kesepakatan antara anggota-anggota (pemerintah dan non-pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya.<sup>13</sup>

Manurut Clive Archer, peranan organisasi internasional dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

- 
- a.) Sebagai instrumen. Organisasi internasional digunakan negara-negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik luar negerinya.
  - b.) Sebagai arena. Organisasi internasional merupakan tempat bertemu bagi anggota-anggotanya untuk membicarakan dan membahas masalah-masalah yang dihadapi. Tidak jarang organisasi internasional digunakan oleh beberapa negara untuk mengangkat masalah dalam negerinya, ataupun masalah dalam negeri negara lain dengan tujuan untuk mendapatkan perhatian internasional.
  - c.) Sebagai aktor. Organisasi internasional bertindak sebagai pelaku atau aktor internasional yang memiliki wewenang untuk membentuk kebijakan-kebijakan yang harus dipatuhi oleh para anggotanya.

Adapun fungsi organisasi internasional menurut A Le Roy Bennet adalah:

---

<sup>13</sup> Clive Archer. *International Organization*. 1883. London: Allen & Unwin. Ltd.

a.) Menyediakan hal yang dibutuhkan bagi kerja sama yang dilakukan antar negara dimana kerja sama tersebut menghasilkan keuntungan yang besar bagi seluruh bangsa.

b.) Menyediakan banyak saluran-saluran komunikasi antar pemerintah sehingga ide-ide dapat bersatu ketika masalah muncul ke permukaan.<sup>14</sup>

c.) Karen Mingst memberikan jabaran yang lebih luas lagi tentang fungsi organisasi internasional. Ada beberapa fungsi yang bisa dijalankan oleh Organisasi Internasional baik itu di tingkat internasional, negara, maupun individu.<sup>15</sup> Pada tingkat internasional, Organisasi Internasional berperan dalam:

1. Memberikan kontribusi untuk terciptanya suasana kerja sama di antara negara/aktor. Dengan adanya organisasi internasional, diharapkan negara dapat bersosialisasi secara reguler sehingga dapat tercipta suatu kondisi yang dianjurkan oleh kaum fungsionalist. Fungsi ini dapat kita temui dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

2. Menyediakan informasi dan pengawasan. Fungsi ini sejalan dengan pemikiran tentang Collective Goods, di mana organisasi internasional menyediakan informasi, hasil-hasil

---

<sup>14</sup> Anak Agung Banyu Perwira dan Yanyan Mochamad Yani. 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

<sup>15</sup> Karen Mingst, *Essentials of International Relations*, 1999, WW Norton & Company, New York, hal. 241-245

survei dan juga pengawasan. Contohnya World Trade Organization (WTO), International Atomic Energy Agency's (IAEA).

3. Memberikan bantuan terhadap penyelesaian konflik. Contohnya: World Trade Organization (WTO) dan International Court of Justice (ICJ).

4. Mengkoordinir aktivitas internasional mengenai permasalahan bersama. Misalkan World Health Organization (WHO) dalam penanganan penyebaran penyakit SARS dan United Nations High Commission for Refugees (UNHCR) dalam menganani pengungsi.

5. Menyediakan arena untuk bargaining bagi negara-negara dalam menyelesaikan suatu masalah. Misalkan European Council of Ministers dan beberapa forum bersama tingkat menteri lainnya.

6. Membentuk rezim internasional. Misalkan rezim perdagangan internasional, rezim moneter Eropa, dan lain-lain.

Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) merupakan salah satu organisasi internasional yang mengklaim dirinya sebagai aktor yang beraksi demi kepentingan ummah transnasional (mu'minin). Bagaimanapun, organisasi ini secara efektif dibuat oleh kesucian negara berdaulat. Prinsip

tersebut telah diabadikan dalam piagam OKI dan telah membuktikan organisasi ini dalam sebuah bingkai kerja operasional yang bertekad untuk mencapai cita-cita kesatuan dan kepentingan muslim. Organisasi ini telah menjadikan 57 negara muslim berjuang bersama seperti Indonesia dan Maroko, dan beberapa negara dengan minoritas muslim yang signifikan seperti Rusia dan India. Tujuan persatuan bagi organisasi ini adalah untuk melindungi Islam, dengan asumsi bahwa ikatan kepercayaan menyebabkan tercapainya kepentingan bersama. Sejarah OKI membuktikan fakta untuk mewakili kepentingan muslim di kancah internasional.<sup>16</sup>

Dari teori organisasi internasional ini, akan dibahas pada pembahasan di bab kelima dari skripsi ini. Fenomena islamophobia yang merupakan dampak dari terorisme, memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap dinamika Hubungan Internasional. Fenomena tersebut telah menarik perhatian global. Kini hampir setiap negara mendeklarasikan gerakan “perang melawan teroris”, namun sayangnya gerakan tersebut justru berdampak negatif bagi sebagian besar muslim. Dengan adanya tindak diskriminatif kepada warga muslim, tentu telah mendesak negara-negara lain terutama negara Islam atau negara dengan penduduk mayoritas Islam, mengancam hal tersebut. Aktor non-negara pun berperan di dalamnya. OKI

---

<sup>16</sup> Shahram Akbarzadeh and Kylie Connor. *The Organization of the Islamic Conference: Sharingan Illusion*. Middle East Policy, Vol. XII, No.2, Summer 2005. Hlm 79.

adalah salah satu organisasi internasional yang berperan untuk mengatasi tindak islamophobia. OKI berupaya agar nilai demokrasi dapat terus ditegakkan bagi seluruh muslim di penjuru dunia. Sebagai pihak ketiga, OKI telah mengasumsikan 4 tipe utama dalam peran membangun perdamaian, yaitu; penyedia bantuan kemanusiaan kepada rakyat dalam keadaan darurat, fungsi rehabilitasi, fungsi pencegahan melalui peringatan dini, dan tindakan resolusi konflik.<sup>17</sup> Jadi dalam penulisan ini OKI berperan dalam bagaimana organisasi internasional bertindak sebagai pelaku atau aktor internasional yang memiliki wewenang untuk membentuk kebijakan-kebijakan yang harus dipatuhi oleh para anggotanya.

### **2.2.2 Teori Hak Asasi Manusia**

Liberalisme dipahami sebagai sebuah ideologi yang mana menjunjung tinggi kebebasan individu. Jackson Sorensen menyatakan bahwa liberalisme adalah suatu perspektif yang memiliki pandangan positif tentang sifat manusia. Liberalisme juga dikenal sebagai sebuah paham optimisme. Liberalisme umumnya memandang baik sifat dan karakter dasar manusia. Sekiranya terdapat tiga asumsi dasar liberalisme. Pertama, pandangan positif tentang sifat manusia. Kedua, keyakinan

---

<sup>17</sup> Muzaffer Ercan Yilmaz. *The Organization of the Islamic Conference as a Conflict Manager in the Arab Spring*. Turkish Journal of Politics. Vol 4, No. 1. Summer 2013. Hlm. 87-91.

bahwa hubungan internasional dapat bersifat kooperatif daripada konfliktual. Dan ketiga, keyakinan terhadap kemajuan.

Kemajuan bagi kaum liberal selalu merupakan kemajuan bagi individu. Perhatian dasar liberalisme adalah kebahagiaan dan kesenangan individu. John Locke berpendapat bahwa negara muncul untuk menjamin kebebasan warga negaranya dan kemudian mengizinkan mereka menjalani kehidupannya dan menggapai kebahagiaannya tanpa campur tangan yang tak semestinya dari orang lain.<sup>18</sup>

Penganut liberal memiliki keyakinan besar terhadap akal pikiran manusia dan mereka yakin bahwa prinsip-prinsip rasional dapat dipakai pada masalah-masalah internasional. Kaum liberal melihat sistem internasional berkembang dalam sistem anarki, dan mengakui bahwa individu selalu mementingkan diri sendiri dan bersaing terhadap suatu hal, namun mereka juga percaya bahwa individu-individu memiliki banyak kepentingan dan dengan demikian dapat terlibat dalam aksi sosial yang kolaboratif dan kooperatif baik domestik maupun internasional. Hal tersebut didasarkan pada pandangan liberal terhadap manusia, bahwa manusia adalah makhluk yang rasional, menempatkan kebebasan individu di atas segalanya, berpandangan positif terhadap karakteristik manusia, serta yakin terhadap kemajuan.

---

<sup>18</sup> Robert Jackson dan Georg Sorensen. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. 2009. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar) h. 142

Liberalisme dalam memberikan jawaban mengenai permasalahan dalam menjaga perdamaian dan kestabilan internasional adalah dengan penggunaan *collective security*, yang menjamin perdamaian dan kebebasan bagi semua pihak. Maka untuk mendukung cita-cita menjaga perdamaian dan kebebasan bagi semua pihak melalui *collective security*, liberalisme memperkenalkan ideologi demokrasi yang merupakan sebuah ideologi yang membawa dan mengutamakan perdamaian serta penegakan HAM bagi tiap individu di muka bumi.<sup>19</sup>

Liberalisme menjunjung tinggi nilai demokrasi. Salah satu prinsip utama dalam demokrasi ialah kebebasan. Dalam penelitian ini, terkait dengan kasus yang ditelaah, penulis akan fokus pada prinsip kebebasan dalam beragama. Dengan adanya prinsip kebebasan, manusia tidak akan merasa tertekan untuk menyalurkan aspirasinya dan bebas menjalankan ajaran agama yang diyakininya. Orang yang beragama dan berdemokrasi akan menjadikan agama sebagai sumber dan dasar-dasar inspirasi, spiritual, dan moral dalam setiap tarikan nafas dan perilakunya. Karena itu, dalam berdemokrasi dan beragama, manusia dituntut untuk mendewasakan sikap mental dengan mengutamakan toleransi, menebarkan cinta kasih, mengokohan persaudaraan, menumbuhkan kedamaian dan berkerjasama dalam membangun masyarakat sebagai manifestasi substansi agama.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> Ahmad Suhelmi. *Pemikiran Politik Barat*, 2007. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 205

Demokrasi merupakan sistem yang mengembalikan semua hak kepada rakyatnya, dari pemilihan pemimpinnya, pemerintahannya, sampai kepada keyakinan yang dianutnya. Dengan adanya keberagaman agama dalam kehidupan manusia, maka sistem demokrasi ini mempunyai peran yang penting untuk menuju kerukunan antar umat beragama. Kerukunan antar umat beragama merupakan hal penting untuk mencapai sebuah kesejahteraan hidup. Perbedaan yang terjadi dalam masyarakat bukan penghalang untuk hidup rukun dan damai. Maka perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen masyarakat untuk tidak memecah belah dengan melakukan tindakan diskriminatif terhadap umat yang berbeda dengannya.

Menurut John Locke, manusia dalam keadaan alamiah adalah bebas merdeka mengatur tindakan mereka, mempergunakan barang miliknya tanpa perlu izin dan tidak tergantung pada kehendak siapapun. Manusia memiliki derajat yang sama, semua kekuasaan bersifat timbal balik, tidak ada orang yang lebih berkuasa daripada orang lain. Meskipun manusia leluasa menggunakan diri dan barang miliknya, manusia tidak mempunyai kebebasan menghancurkan dirinya sendiri ataupun orang lain. Keadaan alamiah menurut Locke merujuk pada keadaan dimana manusia hidup dalam kedamaian, kebajikan, penuh kebebasan dan penuh kesetaraan.<sup>21</sup>

Maraknya konflik sosial yang terjadi di penjuru dunia, terutama yang berbasis isu agama kian tak terbendung. Kekerasan berbasis isu agama

---

<sup>21</sup> *Ibid*

begitu cepat menyebar ke berbagai lapisan masyarakat. Oleh karenanya ketentraman hidup masyarakat terganggu dengan adanya kerentanan yang luar biasa oleh kondisi keberagaman tersebut. Kini, agama sering kali dijadikan titik singgung paling sensitif dalam pergaulan masyarakat yang majemuk. Maka dari itu sangat perlu usaha manusia untuk mewujudkan hubungan yang harmonis antar umat beragama, salah satu caranya yaitu mengembangkan sikap toleransi.

Di berbagai belahan dunia, kita sedang menyaksikan gerakan-gerakan keagamaan untuk memperkokoh pembentukan sistem sosial dan politik yang lebih demokratis. Agama menjadi media yang baik untuk memberi pemahaman tentang demokrasi. Namun di belahan dunia lain, keduanya saling berbenturan. Agama tidak jarang dijadikan sebagai alat provokasi pemecah belah persatuan. Padahal keberagaman beragama pada hakikatnya adalah dasar bagi terciptanya persatuan dalam perbedaan. Kebebasan beragama adalah hak setiap manusia. Maka toleransi antar umat beragama adalah cara agar kebebasan beragama dapat terlindungi dengan baik.

Demokrasi sering kali diartikan sebagai penghargaan terhadap hak asasi manusia, partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan persamaan hak di hadapan hukum. Dari sini kemudian hakikat demokrasi sering dikaitkan dengan idiom-idiom seperti egalite (persaman), equality (keadilan), liberty (kebebasan), serta human right (hak asasi manusia).<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Ubaedillah, A dan Abdul Rozak. *Pendidikan Kewarga[negara]an (Civic Education)*:

Dalam kasus tindakan islamophobia di Perancis, Sebagai kaum minoritas yang semakin hari kian termarjinalkan, muslim semakin gencar melakukan upaya serta perjuangan demi mendapatkan HAM secara hakiki. Menurut *Teaching Human Rights* yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya mustahil manusia dapat hidup sebagai manusia dan tanpa hak tersebut, eksistensinya sebagai manusia akan hilang. John Locke juga mengungkapkan pandangannya mengenai HAM. Menurutnya, HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai sesuatu yang kodrati. Maka tidak ada kekuasaan apapun yang dapat mencabut hak asasi setiap manusia. Karena HAM adalah hak dasar yang dimiliki manusia di muka bumi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.<sup>23</sup>

HAM didasari oleh kebebasan individu. Ia adalah hak yang melekat pada seluruh manusia, apa pun kewarganegaraan, tempat tinggal, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, warna kulit, agama, bahasa, atau status lainnya yang mereka miliki. Manusia dimanapun ia berada sama-sama berhak memiliki hak asasi tanpa merasa dibeda-bedakan. Salah satu upaya dalam penegakan HAM adalah dengan menghapus segala tindak diskriminasi, termasuk diskriminasi agama. Diskriminasi agama

---

*Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. 2014. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah dan Kencana Prenada Media Group. Hlm 148.

<sup>23</sup> *Ibid*

merupakan situasi ketika seseorang diperlakukan tidak adil dibandingkan orang lain dalam situasi yang sama karena perbedaan agama yang dianut.

Isu HAM memang tak luput dalam pengamatan OKI. Hal ini semakin jelas dengan adanya konseptualisasi HAM sebagaimana yang tercantum dalam *Cairo Declaration Of Human Right in Islam* (CDHRI) yang terbentuk pada tahun 1990.<sup>24</sup> Pengamatan secara intens oleh OKI terhadap isu HAM tentu menjadikannya tidak tinggal diam dalam menanggapi fenomena tindakan islamophobia. Berbagai tindakan diskriminatif yang merugikan umat Islam telah menarik kehadiran OKI untuk menjalankan perannya sebagai organisasi pengayom umat.

Maka berdasarkan penjabaran di atas, peran OKI akan dilihat sebagai upaya mencapai kebebasan beragama dan beribadah sebagaimana dijelaskan dalam teori Liberal, demi menghilangkan tindakan islamophobia yang diskriminatif sehingga tercapailah nilai-nilai demokratis yang dilengkapi dengan penyebaran bukti HAM secara merata bagi seluruh umat di penjuru dunia. Pembahasan teori HAM akan saya bahas di bab kelima.

### **2.3 Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran akan digunakan oleh penulis sebagai acuan untuk menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian.

---

<sup>24</sup> Katharina Hausler, dkk. *Human Rights, Democracy, and Rule of Law: Different Organizations, Different Conceptions*. Frame. Large-Scale FP7 Collaborative Project GA No. 320000. Hlm 147.

Fungsi dari kerangka pemikiran adalah agar penelitian mampu dirumuskan dengan menggunakan teori dalam proses penyusunannya. Dalam skripsi ini, kerangka pemikiran menjadi alur logika bagi peran OKI atas fenomena islamophobia berdasarkan berbagai visi-misinya, yang disesuaikan dengan teori organisasi internasional dan teori Hak Asasi Manusia.

